



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 24 /KPTS/ I /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan suatu program yang berkesinambungan sebagai usaha yang terencana dan bertahap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, perlu dibentuk Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-070-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/Menko/Kesra/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/8698/PMD, tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Perbatasan;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/109/PMD, tanggal 2 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Bupati Bengkalis Nomor: 412/BPM-PD/2012/341, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kesiapan dan Partisipasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola kegiatan pembangunan partisipatif, mengelola aset produktif dan sumberdaya alam serta program/proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa;
 - b. dalam hubungannya dengan Lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK), maka tugas Badan Kerjasama Antar Desa adalah merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan Unit Pengelola Kegiatan dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, pelayanan usaha kelompok dan peranserta dalam pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Ketua Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Camat terkait;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 24/1cpts/I/2013
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
 PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
 MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO.	NAMA	LOKASI TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	2.	3.	4.
1.	AFRIZAL CANDRA	KECAMATAN BENGKALIS	KETUA
2.	ANTONI	KECAMATAN BENGKALIS	SEKRETARIS
3.	Drs. H. MARIYANTO	KECAMATAN BENGKALIS	BENDAHARA
4.	H. SYAMSUDIN	KECAMATAN BANTAN	KETUA
5.	TURADI, A.md	KECAMATAN BANTAN	SEKRETARIS
6.	SEPTA EKA SETIA, SKM	KECAMATAN BANTAN	BENDAHARA
7.	H. ANWAR UJANG	KECAMATAN MANDAU	KETUA
8.	BAHARUDDIN JANG	KECAMATAN MANDAU	SEKRETARIS
9.	SRI SUHARNI	KECAMATAN MANDAU	BENDAHARA
10.	M. UMAR S	KECAMATAN PINGGIR	KETUA
11.	SUPARTO	KECAMATAN PINGGIR	SEKRETARIS
12.	MUHAMMAD BASIR	KECAMATAN PINGGIR	BENDAHARA
13.	Hj. FAUZIAH ASMARA, SS	KECAMATAN SIAK KECIL	KETUA
14.	AMIN AZHARI	KECAMATAN SIAK KECIL	SEKRETARIS
15.	AGUS PONIRIN	KECAMATAN SIAK KECIL	BENDAHARA
16.	MAHADAR	KECAMATAN BUKIT BATU	KETUA
17.	M. FAUZI	KECAMATAN BUKIT BATU	SEKRETARIS
18.	YUSMANITA	KECAMATAN BUKIT BATU	BENDAHARA
19.	YAHYA	KECAMATAN RUPAT	KETUA
20.	DOLI MARDONA, M.Si	KECAMATAN RUPAT	SEKRETARIS
21.	FATMAWATI	KECAMATAN RUPAT	BENDAHARA
22.	TUMADI	KECAMATAN RUPAT UTARA	KETUA
23.	ISKANDAR	KECAMATAN RUPAT UTARA	SEKRETARIS
24.	M. ARIS	KECAMATAN RUPAT UTARA	BENDAHARA

BUPATI BENGKALIS,


 H. HERLIYAN SALEH